

ABSTRACT

The presence of street vendors (PKL) is an important part of the city's economic system because it is able to provide the needs of urban communities at affordable prices, especially the middle to lower classes. Street vendors are able to provide unlimited amounts of employment and increase Locally-generated Revenue (PAD). But on the other hand, the existence of street vendors often occupies land in the urban area that is not its use according to spatial law such as sidewalks and roadsides which affect the aesthetics of the urban area with clutter problems, hamper traffic, slums, and reduce the beauty of the city. Even it is not uncommon for Urban Space that should be functioned publicly, often permanently occupied by street vendors. The area of Surakarta City is located at the crossroads of regional transportation routes has led to advances in the development of resources, economic potential, trade and other sectors that promise and make magnets to especially the Subosukowonosraten region. Along with that, the informal sector actors who are quite diverse in it have colouring to the growth of the city of Surakarta, one of them is the Street Vendor (PKL).

Surakarta City is known to the world because of its success in managing street vendors without resistance. But over time, the problem appears related to the existence of the street vendors at the structuring location, the street vendors chose to leave the arrangement location and chose to sell in other locations. So that the achievement of the objectives of this program is still questionable. Research question is the extent to which the success of the street vendor relocation program has been carried out so far in Surakarta City. To find out and assess the success of the street vendors structuring program, it can be done through evaluation studies. Evaluation criteria that will be used are effectiveness, efficiency, responsiveness and impact (Dunn (1994), Subarsono (2005), Solihin (2011), Batlajeri (2015)). The existence of street vendors at the structuring location also needs to be investigated so that the factors that influence street vendors to stay in the structuring location will also be known. The research method used in conducting evaluations is descriptive method using qualitative and quantitative analysis.

The result is that the implementation of the arrangement and management program for street vendors is not fully implemented in accordance with technical guidelines, especially during the supervision and control stage, and a series of activities are not carried out at the stage of guidance and empowerment. This shows that the Surakarta City Government has not fully paid attention to the street vendors after being moved to a new location. The results of the discussion show that the effectiveness of the program assessed from achieving the objectives is less successful, Program efficiency assessed from the role and process of implementing the program is also less efficient. The impact of the program on the physical, economic and social conditions of street vendors was less successful in seeing the program only providing business legality (ownership) and increasing interaction between street vendors, while the economic aspects of this program were considered to be failing in improving the street vendors' economy. Program responsiveness is the level of satisfaction of the target group, which are street vendors also feel less satisfied. Factors that influence street vendors to remain in the structuring location include market share, the presence of competitors, market visibility and shelter, conditions of supporting facilities and infrastructure, the existence of guidance and assistance as well as official supervision

Keywords: *Street vendors, evaluation, management and arrangement, Surakarta City*

INTISARI

Kehadiran para Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi kota karena mampu menyediakan kebutuhan masyarakat perkotaan dengan harga terjangkau terutama golongan menengah kebawah, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak terbatas serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun disisi lain keberadaan PKL sering menempati lahan-lahan di kota yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti trotoar dan tepi jalan sehingga merusak estetika kota dengan masalah kesemrawutan, menghambat lalu lintas, kekumuhan, serta mengurangi keindahan kota. *Urban Space* yang mestinya berfungsi publik, seringkali diokupasi secara permanen oleh PKL. Kota Surakarta yang strategis berada pada persimpangan jalur transportasi regional menyebabkan kemajuan berbagai tumbuh kembangnya sumber daya, potensi ekonomi, perdagangan dan sektor lain yang menjanjikan dan menjadikan magnet terutama wilayah Subosukowonosraten. Seiring dengan itu, para pelaku sektor informal yang cukup beragam didalamnya ikut mewarnai pertumbuhan kota Surakarta salah satunya ialah PKL. Keberadaan PKL yang meningkat setiap tahunnya mulai meresahkan dan mengganggu, sehingga Pemkot Kota Surakarta mengambil sebuah tindakan yang berupa program pengelolaan dan penataan PKL.

Kota Surakarta dikenal dunia dikarenakan keberhasilan nya dalam menata PKL tanpa adanya perlawanan dari pedagang. Namun seiring berjalannya waktu, munculah permasalahan terkait dengan eksistensi para pedagang pada lokasi penataan yakni para pedagang memilih meninggalkan lokasi penataan dan memilih berjualan di lokasi lain. Sehingga keberhasilan dan ketercapaian tujuan dari program ini dipertanyakan. Pertanyaan penelitian yang diangkat yakni sejauhmana tingkat keberhasilan pelaksanaan program relokasi PKL yang dilakukan selama ini di Kota Surakarta. Untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dari program penataan PKL maka dapat dilakukan melalui studi evaluasi. Kriteria evaluasi yang akan digunakan yakni efektivitas, efisiensi, responsivitas dan dampak (Dunn (1994), Subarsono (2005), Solihin (2011), Batlajeri (2015)). Eksistensi pedagang pada lokasi penataan juga perlu untuk diteliti sehingga akan diketahui faktor- faktor yang mempengaruhi pedagang untuk tetap bertahan pada lokasi penataan. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan evaluasi adalah metode diskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

Hasilnya adalah proses pelaksanaan program penataan dan pengelolaan PKL tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan pedoman teknis terutama pada tahap pengawasan dan penertiban, serta tidak dilakukannya serangkaian kegiatan pada tahap pembinaan dan pemberdayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Surakarta belum sepenuhnya memperhatikan nasib pedagang setelah dipindahkan pada lokasi baru. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa efektifitas program yang dinilai dari pencapaian tujuan kurang berhasil, efisiensi program yang dinilai dari peran dan proses pelaksanaan program juga kurang efisien. Program memberikan dampak negative terhadap kondisi ekonomi dan sosial pedagang. Responsivitas program yakni tingkat kepuasan kelompok sasaran yakni pedagang juga merasa kurang puas terhadap hasil program dan kinerja pelaksana program. Faktor- faktor yang mempengaruhi pedagang untuk tetap bertahan pada lokasi penataan antara lain lokasi yang dilihat dari pangsa pasar, keberadaan pesaing, visibilitas pasar maupun shelter. Selanjutnya faktor kondisi sarana dan prasarana pendukung, adanya pembinaan dan pendampingan serta adanya pengawasan dinas.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Evaluasi , Penataan dan Pengelolaan PKL, Kota Surakarta